

Oligarki dan Jaringan Patronase: Dinamika Kebijakan Pertambangan Batu bara di Kabupaten Tanah Bumbu

M. Uhaib As'ad¹, Barsihanor², Sobirin³, Putri Hergianasari⁴

^{1,2}Program Studi Administrasi Publik, Universitas Islam Kalimantan

³Fakultas Hukum Universitas Ahmad Dahlan

⁴Program Studi Hubungan Internasional, Universitas Kristen Satya Wacana

Received: (5 September 2022)

Revised: (9 Maret 2023)

Published: (30 April 2023)

Abstrak:

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran oligarki lokal dan jaringannya dalam kebijakan pertambangan batubara serta menganalisis relasi bisnis dan politik sebagai jaringan patronase dan implikasinya terhadap dinamika ekonomi dan politik lokal di Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan. Metode penelitian dalam artikel ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, yang dikerangkai dengan teori oligarki Winters dan Robison-Hadiz. Alasan memilih Kabupaten Tanah Bumbu sebagai lokasi penelitian karena secara empiris wilayah ini menjadi episentrum eksploitasi tambang dan lahirnya sejumlah oligarki lokal kroni kapitalis yang memiliki pengaruh bisnis dan kekuasaan. Hasil penelitian ini yaitu bahwa sejumlah perusahaan tambang batubara bukan saja sebatas aktivitas ekonomi-bisnis saja, akan tetapi telah merambah kepada wilayah politik kekuasaan. Artikel ini menyimpulkan bahwa sumber daya tambang batubara telah menjadi instrumen persekongkolan para aktor politik dan aktor bisnis (pengusaha tambang) untuk membangun jaringan patronase politik dan bisnis. Jaringan patronase politik dan bisnis semakin terstruktur. Pemilihan kepala daerah (Pilkada) langsung sebagai praktik demokrasi pasca reformasi telah melahirkan transisi demokrasi yang memberikan ruang dan kesempatan bagi para aktor bisnis.

oligarki lokal; jaringan patronase; tambang batu bara; pilkada

Pendahuluan

Penelitian ini menjelaskan mengenai relasi bisnis dan politik dalam kebijakan pengelolaan tambang batu bara sebagai sumber patronase bisnis dan politik bagi para oligarki di Kabupaten Tanah Bumbu. Proses dialektika persekongkolan kepentingan para oligarki melahirkan kroni kapitalis dan jaringan patronase dalam pusran ekonomi dan kekuasaan politik lokal.

Studi mengenai relasi bisnis dan politik dalam perspektif ekonomi politik dan kebijakan publik, sesungguhnya bukan hal baru dan menjadi perdebatan menarik

Korespondensi:

Program Studi Administrasi Publik, Universitas Islam Kalimantan, Jl. Adhyaksa, Sungai Miai, Kec. Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan 70123.
Email: uhaibm@yahoo.com

secara teoritik dan akademik dikalangan ilmuwan sosial, ekonomi, dan politik, khususnya dalam konteks memahami relasi bisnis dan politik di masa rezim Orde Baru berkuasa (Kadir, 2020). Pada studi tersebut menemukan fakta bahwa struktur ekonomi dan kekuasaan politik dikendalikan oleh kekuatan oligarki dan kroni kapitalis yang berpusat dalam lingkaran para elite Orde Baru (Ananta, 2014). Mereka memiliki pengaruh koneksi kuat menembus pusat-pusat kekuasaan dan birokrasi pemerintahan yang bercorak oligarkis, predatoris, dan patrimonialistik. Munculnya kelompok tersebut karena mendapatkan proteksi kekuasaan, fasilitas kebijakan, dan lisensi dari negara (Suryani et al., 2021). Mereka dalam menjalankan aktivitas bisnis memonopoli penguasaan sumber daya ekonomi negara dan menjadi pemburu rente ekonomi yang dapat digambarkan sebagai kapitalis semu. Mentalitas kelompok oligarki dan kroni kapitalis sebagai penumpang gelap pada institusi-institusi negara dan lembaga-lembaga demokrasi dalam struktur ekonomi dan politik otoriter-sentralistik (Fitriani, 2021).

Dalam transisi politik dan konsolidasi demokrasi terjal dan berliku, warisan rezim Orde Baru masih membekas dalam struktur politik dan ekonomi sampai saat ini. Praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) dan penyalahgunaan kekuasaan pada lembaga-lembaga kekuasaan negara dan lembaga-lembaga demokrasi menjadi sarang bercokolnya para koruptor, termasuk korupsi kebijakan sumber daya alam (Afala, 2017). Meskipun secara formal rezim Orde Baru sudah berganti, namun secara simbolik dan substantif, perilaku koruptif dan pengaruh oligarki dalam pengelolaan ekonomi negara dan kekuasaan politik menjadi persoalan serius dalam sistem politik dan demokrasi yang semakin kapitalistik. Aktor bisnis atau pemilik modal berlomba-lomba masuk ke dalam panggung kekuasaan politik sebagai calon kepala daerah atau menjadi calon legislatif melalui kuasa uang. Fenomena kuasa uang, menjadi kesempatan oleh para oligarki melakukan barter-berter kepentingan dan merusak semangat demokrasi yang menjadi mimpi bangsa Indonesia pada saat reformasi politik Mei 1998 lalu (Samsuddin et al., 2019).

Mahalnya ongkos demokrasi, membuka kesempatan para pemilik modal menjadi petarung atau menjadi bandar politik. Menurut catatan *International Institute for Democracy and Electoral Assistance* (IDEA) menyatakan bahwa permasalahan berat dalam politik Indonesia adalah makin menguatnya kekuasaan politik dengan sektor bisnis. Keadaan politik Indonesia seperti yang terjadi di negara-negara Afrika, korupsi politik berkelindan dengan penguasaan bisnis sumber daya alam seperti tambang dalam kontestasi demokrasi yang pada akhirnya sumber daya alam hanya dikuasai oleh segelintir kelompok tertentu saja (Puskapol.ui.ac.id, 2018).

Korupsi kebijakan secara konvensional adalah penyalahgunaan yang terjadi di lembaga-lembaga politik seperti partai politik, parlemen, lembaga pemilihan umum, badan perencanaan pembangunan, dan lainnya sebagai cara tetap bertahannya kekuasaan oligarki (Alatas, 1975). Bekerjanya mesin politik uang pada setiap pesta demokrasi sehingga pesta demokrasi menjadi arena membangun

patronase dan klientelisme politik melalui politik uang. Menurut Edward Aspinall, konsep politik uang terdiri dalam tiga bentuk: *vote buying* (pemberian uang tunai langsung), *club goods* (pemberian barang pengikat), dan *pork barrel* (pemberian fasilitas publik) yang bertujuan mempengaruhi pilihan politik publik (Aspinall & Sukmajati, 2014)

Salah satu fakta korupsi kebijakan atau korupsi politik yang terjadi pada pengelolaan sumber daya alam seperti dirilis oleh *Greenpeace* Indonesia, Jatam, ICW, dan Auriga yaitu bahwa praktek korupsi terjadi karena ada hubungan kuat dengan pilkada berbiaya tinggi. Daerah kaya sumber daya alam menjadi instrumen persekongkolan dan barter politik antara politisi atau calon kepala daerah dengan pengusaha (Mulyawan, 2021). Kasus korupsi Bupati Kutai Kartanegara dan Bupati Samarinda yang terjerak korupsi politik karena mengeluarkan banyak izin tambang bermasalah sebagai *empirical evidence*. Bupati Kutai Kartanegara menerbitkan 254 izin usaha pertambangan batu bara. Bupati Samarinda menerbitkan 63 izin tanpa melakukan Amdal dalam masa kampanye politik tahun 2009. Kasus yang sama juga terjadi pada Bupati Kotawaringin Timur 2010-2015 yang menyelewengkan kewenangan untuk izin tiga perusahaan bauksit (Wibisono, 2018). Di tingkat provinsi kasus, Gubernur Sulawesi Tenggara, dituntut oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dengan kerugian negara mencapai Rp 4,3 triliun, karena menyelewengkan kewenangannya untuk mengizinkan pertambangan nikel (Kompas.com, 2017). Kasus korupsi kebijakan dalam sumber daya alam karena tidak adanya transparansi dan akuntabilitas sebagai bagian penting dalam prinsip-prinsip *good corporate governance* dan tidak adanya akses dan kontrol publik menjadi salah satu faktor korupsi dalam tata kelola sumber daya alam. Kewenangan besar kepala daerah dalam pemberian izin usaha dan izin lingkungan rentan terjadi penyeleweng. Korupsi kebijakan melalui persekongkolan politisi dan pebisnis batu bara menyebabkan masyarakat harus berhadapan langsung dengan berbagai masalah yang ditimbulkan. Pada Kasus Kalimantan Selatan, pilkada dan tambang merupakan wilayah politik dan bisnis yang tidak dapat dipisahkan serta menjadi instrumen persekongkolan dan politik transaksional oligarki lokal. Kalimantan Selatan memiliki kecenderungan terhadap praktik korupsi dan bercokolnya oligarki. Kalimantan Selatan menjadi salah satu primadona dalam investasi SDA, baik sektor kehutanan dan tambang (Susanto, 2019).

Artikel ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisa peranan oligarki lokal dan jaringannya dalam kebijakan pertambangan batu bara di Kabupaten Tanah Bumbu. Mengetahui dan menganalisa proses munculnya relasi bisnis dan politik menjadi sumber jaringan patronase dan implikasinya terhadap dinamika ekonomi dan politik lokal di Kabupaten Tanah Bumbu. Pada kasus industri tambang ini telah memunculkan kelompok oligarki, kroni kapitalis, relasi bisnis dan politik sebagai sumber patronase. Tanah Bumbu sebagai lokasi penelitian karena secara empiris wilayah ini menjadi salah satu episentrum eksploitasi tambang dan lahirnya sejumlah oligarki lokal kroni kapitalis yang memiliki pengaruh bisnis dan kekuasaan.

Artikel ini menggunakan desain penelitian kualitatif. Desain ini dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk mengungkap yang terjadi dalam kenyataan empirik. Penelitian ini lebih banyak mengobservasi dan mengeksplorasi perilaku objek yang diteliti, sehingga memungkinkan untuk ditarik hubungan sebab akibat dari penelitian ini (Moleong, 2014). Realitas yang diamati bervariasi dan banyak fakta yang tidak mungkin diungkapkan melalui observasi seperti latar belakang perilaku objek, bagaimana menjalankan kebijakan, dan bagaimana interaksi elite politik dengan instansi birokrasi pemerintah, komparador lokal (pengusaha tambang), politisi atau elite partai politik, serta dengan masyarakat. Dengan demikian, akan terungkap dari observasi dan interaksi antara peneliti dengan objek untuk memperoleh penafsiran empirik, yaitu deskripsi yang didasarkan pada persepsi informan terhadap suatu fenomena yang sedang diteliti (Kusumastuti & Khoiron, 2019).

Pengumpulan Data dengan wawancara mendalam (*In-depth interview*) yang telah dilakukan terhadap informan untuk mendapatkan informasi yang mendalam berupa persepsi, pengalaman, atau pengakuan dari tokoh-tokoh kunci. Data dan informasi yang diperoleh dari wawancara mendalam ini biasanya tidak terdapat pada dokumen atau data sekunder lainnya (Raco, 2018). Dalam kaitan dengan obyek studi, maka wawancara dilakukan terhadap para *stakeholders*. Data informan dirahasiakan karena menghindari hal-hal dikemudian hari yang merugikan kedua belah pihak (peneliti dan informan). Observasi, yang telah dilakukan peneliti dengan melihat secara langsung di lokasi pertambangan terkait fenomena relasi para aktor dalam jaringan ekonomi politik kebijakan pertambangan. Peneliti telah menggali informasi yang bersifat teoritis yang terdapat di berbagai jurnal, hasil kajian, laporan penelitian, atau publikasi lainnya. Dalam menerapkan telaah ini dilakukan seleksi terhadap informasi-informasi atau teori-teori yang relevan. Teori yang diperoleh dipergunakan sebagai alat analisa untuk menguraikan atau menjelaskan pertanyaan dan masalah penelitian.

Relasi Bisnis dan Politik

Fenomena relasi bisnis dan politik semakin menguat pasca rezim pemerintahan Orde Baru (Agustino & Yusoff, 2010). Di era demokrasi yang diiringi kebijakan desentralisasi para pelaku bisnis telah menjadikan sumber daya alam di daerah menjadi instrumen persekongkolan untuk memperkuat basis patronase bisnis dan politik demi kepentingan ekonomi dan kekuasaan politik. Salah satu arena aktualisasi persekongkolan para aktor adalah melalui arena pemilihan kepala daerah (Simanjuntak, 2015). Para oligarki lokal dan kelompok kepentingan lainnya membangun jaringan patronase untuk mengakumulasi sumber daya ekonomi dan politik lokal. Para oligarki dan kelompok kepentingan lainnya berusaha mempengaruhi penguasa sebagai regulator agar setiap kebijakan yang terkait dengan kepentingan bisnis berpihak kepada kepentingan pengusaha untuk memonopoli ekonomi dan proyek-proyek infrastruktur pemerintah. Penguasa sebagai regulator

memberikan kesempatan bagi para pemburu rente. Para pemburu rente berkembang seiring semakin menguatnya pola patronase dan berlindung di balik regulasi, lisensi, dan proteksi kebijakan yang diberikan negara (As'ad, 2020). Para elite Orde Baru dalam mendesain sistem pemerintahan, negara tampil secara dominan dan merefleksikan *predatory state model* yang memonopoli penguasaan ekonomi dan politik (Moselle & Polak, 2001). Negara yang bercirikan *predatory state model*, juga sebagai *rentier state model*, yaitu negara tampil sebagai sumber akumulasi dan monopolistik terhadap sumber daya ekonomi negara. Institusi negara menjadi arena persekongkolan kepentingan para oligarki dan kelompok kepentingan lainnya (Puranen & Widenfalk, 2007).

Mengacu pada paparan di atas, bahwa para pemilik modal yang sedikit jumlahnya pada kenyataannya menguasai dan mengatur masyarakat yang lebih banyak jumlahnya, dominasi ini terjadi karena adanya kerjasama antara modal dengan negara. Dialektika antara negara dan modal dalam perkembangannya menunjukkan adanya dominasi di mana hubungan di antara keduanya berjalan dengan tidak asimetris karena modal lebih dominan dibanding kekuasaan sebuah negara. Melalui kekayaan itu para pemilik modal lebih memainkan peran strategis, misalnya dalam menentukan keputusan-keputusan penting yang dibuat oleh negara. Dominasi elite dalam dialektika antara bisnis dan politik dalam masyarakat kapitalis merupakan relasi yang asimetris, yaitu menguntungkan modal dan merugikan masyarakat. Dalam pola dialektika demikian negara menjadi alat dari pemilik modal dan membela modal demi akumulasi modal. Jaringan bisnis dan politik antara negara dan pemilik modal yang melahirkan perilaku *rent-seeking* dalam kebijakan pengelolaan sumber daya alam, khususnya pada eksploitasi pertambangan batu bara. Pertama, bahwa desentralisasi pengelolaan sumber daya tambang batu bara, institusi kekuasaan dan regulasi yang ada tidak merefleksikan *local government accountability* dan *local government responsiveness* dalam pengelolaan sumber daya tambang batu bara, demikian juga tidak adanya keterlibatan partisipasi publik dalam pengawasan pengelolaan pertambangan batu bara. Kedua, Kebijakan dan regulasi tambang yang ada lebih merefleksikan *predatory regulator* yang hanya menguntungkan pihak penguasa-pengusaha dan tidak menguntungkan bagi warga. Kebijakan dan regulasi (Perda) tambang bersifat *predatory regulator* lebih merefleksikan kepentingan klien bisnis yang berpola patronase dan transaksional yang salah satu dampaknya adalah kerusakan lingkungan yang semakin parah.

Pengaruh Oligarki dalam Kebijakan Pertambangan Batu bara

Aktivitas industri tambang batu bara di Kalimantan Selatan, khususnya di Kabupaten Tanah Bumbu bukan hanya sekedar sebagai aktivitas bisnis ekonomi saja, tetapi lebih jauh sebagai instrumen persekongkolan Korupsi Kolusi Nepotisme (KKN) para aktor, aktor bisnis dan aktor politik. Para aktor bersekongkol dan saling memanfaatkan sumber daya yang dimiliki masing-masing aktor untuk membangun

jaringan patronase politik dan patronase bisnis. Bagi aktor bisnis (pengusaha tambang), memerlukan instrumen politik agar basis materialnya di bidang tambang dan bisnis lainnya bisa terpayungi. Mereka memerlukan payung politik, kebijakan politik, dan regulasi dari penguasa daerah, DPRD, dan stakeholders politik lainnya. Salah satu modus pesekongkolan politik dan bisnis adalah pilkada sebagai arena perjumpaan kepentingan para aktor atau oligarki.

Kontestasi demokrasi di Kabupaten Tanah Bumbu menjadi instrumen bagi oligarki untuk mentransformasikan kepentingan ekonomi dan politiknya. Pilkada telah menjadi arena pertarungan kepentingan para oligarki untuk menancapkan kekuasaan ekonomi dan kekuasaan politik. Peran pengusaha tambang dalam dinamika politik lokal memiliki pengaruh kuat dan mengatur irama permainan kekuasaan politik. Penguasaan terhadap sumber daya kekuasaan politik memiliki keterkaitan erat dengan penguasaan sumber daya ekonomi, terutama penguasaan sumber daya industri tambang batu bara. Akibatnya, penguasa yang terpilih dalam pilkada sekedar menjadi kacung dari oligarki atau para cukong yang membandari calon kepala daerah selama proses Pilkada. Kepala daerah sekedar sebagai klien dalam mesin birokrasi kekuasaan, sementara pemilik modal atau cukong sebagai patron atau penguasa bayangan. Pada kasus Pilkada di Kabupaten Tanah Bumbu, relasi bisnis dan politik terstruktur dalam pola politik transaksional dan arena pertemuan kepentingan para aktor. Para pengusaha tambang mampu mendikte kekuasaan dan kebijakan, salah satu modusnya adalah menempatkan orang-orang masuk dalam jaringan struktur kekuasaan untuk memperkuat basis patronase politik sebagai strategi mempertahankan keamanan bisnis. Di era demokrasi kapitalistik, modus seperti ini bisa terjadi sebagai dampak dari proses politik dan sistem kekuasaan yang berwatak oligarkis-predatoris, dan perilaku partai politik berwatak kartelistik. Kontestasi demokrasi berbiaya tinggi telah melahirkan struktur kesempatan bagi penguasa daerah merentalkan kekuasaan atau memperdagangkan pengaruh bagi praktek perburuan rente.

Dari temuan penelitian di lapangan, dinamika politik lokal di tanah Bumbu yang oligarkis sebagai representasi dari praktek demokrasi oligarki warisan masa lalu, yaitu demokrasi oligarki pemerintahan Orde Baru. Praktek demokrasi pasca pemerintahan Orde Baru bertransformasi ke level lokal seiring perkembangan demokrasi liberal dan kapitalistik. Warisan oligarkis-predatoris masa lalu masih tetap lestari dan justru semakin menyebar ke level lokal. Isu demokratisasi menjadi arena terbuka bagi berkembangnya oligarki lokal, tumbuh subur terutama daerah kaya sumber daya alam menjadi instrumen basis-basis patronase politik dan bisnis melalui kontestasi politik. Relasi kuasa antara politik dan bisnis sudah lama terbangun dan menjadi fenomena politik dan ekonomi di Kalimantan Selatan. Isu demokratisasi dan kebijakan otonomi daerah menjadi ruang terbuka terjadinya relasi politik dan bisnis. Relasi politik dan bisnis yang terstruktur semakin tampak terutama di saat Pilkada dan Pileg.

Memahami dinamika politik lokal (Pilkada) di Tanah Bumbu, sesungguhnya bukan sebatas ritual demokrasi semata, tetapi sebagai arena pertarungan kekuatan oligarki dan kelompok pengusaha tambang batu bara. Para aktor yang bertarung dalam perebutan kekuasaan masing-masing memiliki pengaruh kuat dan struktur hegemoni dalam konfigurasi perpolitikan di Tanah Bumbu. Struktur hegemoni itu salah satunya dapat dilihat dari keberadaan partai politik (parpol) yang dikuasai oleh pemilik modal berlatar belakang sebagai penguasa tambang. Hasil penelitian ini memberikan konfirmasi partai politik yang ada dikuasai oleh pemilik modal dan berwatak kartelistik dan oligarkis juga menjadi instrumen praktek oligarki dan melestarikan feodalisme politik. Struktur politik dan desain feodalisme politik semakin menjauhkan kualitas demokrasi. Menurut keterangan sejumlah Informan, calon kepala daerah yang bertarung pada pilkada adalah orang-orang yang berlatar belakang sebagai pengusaha tambang atau calon kepala daerah yang memiliki jaringan dengan pengusaha tambang. Pilkada Tanah Bumbu bukan sekadar mementaskan proses demokrasi pada level lokal, tetapi sejatinya adalah pertarungan para aktor bisnis, yaitu arena adu gengsi para bos lokal.

Aktor politik dan aktor bisnis terbangun dimulai pada awal pemekaran Kabupaten Tanah Bumbu dari Kabupaten Kota Baru. Tokoh ZA menjadi saksi sejarah dalam konteks realitas politik dan ekonomi di Tanah Bumbu. Sepak terjang dalam kancah perpolitikan ZA tidak saja sebatas di tanah kelahirannya, Tanah Bumbu, tetapi jauh merambah ke level provinsi dan bahkan nasional. Relasinya dengan sejumlah tokoh lokal (Kalsel) dan pusat (Jakarta) tidak diragukan dan menjadi salah satu tokoh populer yang patut diperhitungkan dalam kancah perpolitikan di Kalsel. Sosok ZA menjadi penting untuk memahami realitas sosio-politik dan bisnis di Tanah Bumbu. Sebagai bupati pertama Kabupaten Tanah Bumbu di tengah teransisi kekuasaan dan konsolidasi birokrasi-organisasi pemerintahan saat itu memunculkan sejumlah orang dekat dengan ZA sebagai orang-orang mereposisi diri masuk ke dalam jaringan struktur kekuasaan atau birokrasi. ZA sebagai penguasa daerah telah dikelilingi para oportunistik, loyalis, kroni bisnis dan politik untuk membangun jaringan patronase politik dan bisnis ditengah sumber daya alam yang kaya pada periode awal ZA berkuasa. Relasi kuasa antara penguasa daerah dan pengusaha pada akhirnya membentuk jaringan klien bisnis yang saling menguntungkan. Kehadiran klien bisnis membentuk pola patron-klien sebagai kelompok strategis yang mewarnai politik lokal Tanah Bumbu. Jaringan aktor bisnis ini mereposisi diri ke dalam jaringan struktur kekuasaan, regulasi, dan proteksi yang diberikan oleh penguasa daerah. Realitas sosio-politik dan ekonomi di Tanah Bumbu sebagai fakta yang menjelaskan hubungan antara relasi aktor politik dan aktor bisnis. Menguatnya relasi antara aktor politik dan aktor bisnis karena peran strategis politik dan kekuasaan ZA. Peta politik di Tanah Bumbu saat ini sedang berada di tangan kekuasaan tokoh Klaster Banjar Pesisir dan sebagai sebagian tokohnya ada di Tanah Bumbu. Sejumlah aktor politik dan aktor bisnis di Tanah Bumbu memiliki pengaruh besar dalam politik lokal Kalsel.

Penguasaan sumber daya politik dan bisnis serta kekuatan jaringan para *local strongman* Tanah Bumbu menjadi kekuatan determinan dalam setiap kontestasi demokrasi (Pilkada Tanah Bumbu) dan Pilgub Kalsel. Membaca peta pertarungan politik lokal (Pilkada) Kabupaten Tanah Bumbu, yang bertarung bukan ZA melawan Sarifuddin H Miming. Sejatinya, pertarungan itu adalah para Jawara tambang di balik kandidasi. Para Jawara tambang ini sama-sama memiliki hubungan emosional dengan ZA ketika menjadi penguasa Tanah Bumbu sebelumnya.

Transisi demokrasi dan konsolidasi demokrasi yang berkepanjangan, perubahan institusi kekuasaan dan lembaga-lembaga demokrasi yang semakin liberal, justru membuat sistem politik melahirkan kekuasaan oligarki. Para pemilik modal dan para perampok negara (*predatoris*), menjadi pemegang kekuasaan dan membagi berbagai konsensi kepada kroni politik dan ekonomi dalam skala masif dan sistemik, dari pusat hingga daerah dan meliputi berbagai sektor strategis. Munculnya sejumlah pejabat daerah berlatar belakang pengusaha sebagai konsekuensi logis mahalnya biaya demokrasi. Sudah menjadi keyakinan politik, hanya kandidat pemilik modal besar saja berpeluang memenangkan kontestasi Pilkada. Hal ini bukan berarti kekuatan uang menjadi satu-satunya penentu kemenangan dalam kontestasi pilkada. Di era kapitalisasi pilkada, uang telah menjadi mitos pragmatisme bagi sebagian publik yang dipertontonkan para kandidat kepala daerah. Di tengah pragmatisme dan persepsi publik yang telah terstruktur bahwa Pilkada adalah arena distribusi uang (*money politics*), jual-beli suara (*vote buying*), dan berbagai macam modus untuk menarik simpatik rakyat. Terkait mahalnya biaya pilkada, para kandidat berusaha mencari dana politik dengan berbagai modus, termasuk modus menjadikan Sumber Daya Alam (SDA) sebagai basis transaksional oleh para aktor yang terkait soal izin pengelolaan sumber daya alam, seperti izin pertambangan, kelapa sawit, kehutanan, dan lainnya, sebagai strategi politik dalam Pilkada.

Ketika dikonfirmasi kepada FM (50 Tahun) mengenai keterlibatan keterlibatan penguasa Tanah Bumbu, birokrat daerah, elite politik dalam jaringan bisnis pertambangan, menyatakan bahwa pada era desentralisasi dan otonomi daerah yang ditandai dengan dengan keterbukaan, para aktor masing-masing mengkonsolidasikan diri membangun kekuatan untuk kepentingan tertentu, baik kepentingan ekonomi atau kepentingan politik. Terkait dengan hal jaringan bisnis pertambangan, tidak tertutup adanya persekongkolan di antara para aktor atau kelompok kepentingan lainnya dalam memperkuat posisi masing-masing. Sumber daya tambang telah memberikan kontribusi paling besar bagi PAD Tanah Bumbu. Namun demikian, potensi tambang yang ada belum memberikan dampak secara signifikan bagi kesejahteraan masyarakat dan tidak sebanding dengan kerusakan lingkungan akibat aktivitas pertambangan. Wawancara dengan AMD YN (50 tahun), pengamat dan konsultan pertambangan di Kalsel, mengungkapkan bahwa dalam pengelolaan tambang telah dimonopoli penguasa dengan berlindung dibalik regulasi dan kekuasaan yang dimiliki. Pada situasi pemerintahan seperti ini membuka potensi

negosiasi kepentingan antara oknum birokrasi daerah dengan pengusaha. Jika pihak-pihak tersebut membangun jaringan kepentingan yang membentuk mata rantai, maka pelaksanaan pemerintahan berjalan dengan tidak sehat, karena tidak ada sistem kontrol dari institusi pemerintah atau lembaga swasta terhadap pengelolaan tambang (Wawancara, 2022).

Untuk memperkuat persekongkolan penguasaan sumber daya tambang adalah dengan cara membangun jaringan bisnis dan politik. Salah satunya adalah menciptakan kroni politik di lembaga legislatif dan kroni bisnis yang menjadi operator tambang. Para kroni politik yang ada di lembaga legislatif tidak terlepas dari peran penguasa daerah yang memainkan peran politik pada pemilu legislatif 2014 lalu, yaitu memberikan dukungan dana dari aktivitas tambang. Relasi kuasa yang terbangun antara penguasa Tanah Bumbu dengan anggota legislatif, memberikan kesan bahwa lembaga legislatif lebih merefleksikan kepentingan para pengusaha dan penguasa. Dalam hal seperti diungkapkan oleh HSND (50 tahun) (Wawancara, 2022). Permasalahan pertambangan di Kabupaten Tanah Bumbu tidak bisa dilepaskan dari peranan pemerintah pusat, karena di Kabupaten Tanah Bumbu ada perusahaan pemilik PKP2B yang sangat signifikan mempengaruhi perekonomian masyarakat khususnya di Satui. Beberapa perusahaan tidak beroperasi lagi dikarenakan permasalahan ketidakmampuan membayar kepada perusahaan sub kontraktornya, sehingga mengakibatkan lebih 4.000 orang karyawan yang kehilangan pekerjaan sehingga menimbulkan dampak terhadap perekonomian di Satui. Komentar yang sama juga dikemukakan oleh IH (57 tahun), mantan anggota DPRD Tanah Bumbu periode 2009-2014 (Wawancara, 2022).

Salah seorang anggota DPRD Tanah Bumbu yang dikenal kritis terhadap sejumlah kebijakan penguasa Tanah Bumbu bernama FM (45 tahun) khususnya terkait pengelolaan kebijakan pertambangan, mengatakan bahwa penguasa Tanah Bumbu saat ini sulit dibedakan posisinya, apakah sebagai regulator dalam kapasitas sebagai representasi negara, atau sebagai operator tambang. Misalnya, dalam pembangunan infrastruktur, hampir semua proyek-proyek pembangunan jalan semuanya didominasi oleh pengusaha yang bernama HT yang menjadi kroni penguasa Tanah Bumbu. Tidak mengherankan bila terjadi kecemburuan dikalangan pengusaha lainnya karena sejumlah proyek infrastruktur jalan dan proyek lainnya semuanya dikerjakan oleh pengusaha HT. HT adalah salah seorang pengusaha lokal yang sukses karena memiliki hubungan dekat dengan penguasa Tanah Bumbu. Ini adalah pola-pola patronase yang terbangun dan patronase tersebut menjalar di lembaga legislatif dan lembaga eksekutif. Di lembaga eksekutif yang menduduki jabatan strategis adalah para loyalis dan kroni penguasa Tanah Bumbu. Oleh karena itu, tidak mengherankan bila di lembaga legislatif dan eksekutif telah terbangun relasi kuasa yang merefleksikan kekuasaan oligarki dan patronase seperti yang terjadi di era kekuasaan oligarki Orde Baru (Wawancara, 2022). Salah seorang konsultan tambang AMD YN (50) menjelaskan mengenai keterlibatan penguasa daerah Tanah Bumbu

dan instansi terkait dalam pengelolaan tambang. Para aktor lokal telah melakukan persekongkolan mengenai pergeseran titik koordinat konses PKP2B milik PT. Arutmin Indonesia, sehingga titik koordinat berubah. Dalam kasus ini maka para aktor yang terlibat akan memanfaatkan koridor untuk ditawarkan kepada para pemilik IUP yang berdampingan dengan konsesi PKP2B PT. Arutmin Indonesia (Wawancara, 2022). Bukti lain indikasi keterlibatan penguasa atau birokrat daerah adalah kasus hak penggunaan jalan bekas PT. Sompul Timber yang dinyatakan sudah tidak berlaku lagi oleh Menteri Kehutanan pada tanggal 30 September 2009. PT. Sompul Timber dinyatakan sudah bangkrut oleh pemerintah pusat, sehingga bekas jalan tersebut dilimpahkan kepada pemerintah provinsi dan selanjutnya diserahkan lagi kepada Pemkab Tanah Bumbu. Terkait hal tersebut, menurut keterangan FS (50 tahun) mantan anggota DPRD Tanah Bumbu periode 2009-2014 (Wawancara, 2002).

Indikasi kerlibatan penguasa Tanah Bumbu dalam jaringan bisnis tambang diungkapkan ISP (48 tahun), reporter Metro TV Tanah Bumbu-Kotabaru menyatakan bahwa di Tanah Bumbu ada tiga aktor kunci yang mengendalikan jaringan bisnis dan politik, yaitu MHM sebagai penguasa Tanah Bumbu, HI dan HTJ keduanya sebagai pengusaha. Hal ini terlihat dengan adanya keluhan masyarakat mengenai monopoli pekerjaan proyek pemerintah Bumbu yang hanya dikerjakan oleh kroni bisnis penguasa daerah saja (Wawancara, 2022). Pada kasus pergeseran tapal batas Kabupaten Tanah Bumbu dengan Kabupaten Tanah Laut, secara jelas ada kepentingan bisnis dan politik yang tersembunyi jika dilihat dalam konteks perizinan pertambangan (IUP) yang ada di sekitar perbatasan tersebut. Menurut FS (50 tahun), mantan anggota DPRD Tanah Bumbu periode 2009-2014 (Wawancara, 2022). Kasus pergeseran tapal batas tersebut menurut MRF (45 tahun), Kepala Desa Sungai Cuka Kecamatan Satui mengatakan bahwa sebenarnya pada waktu itu sudah ada kesepakatan antara kepala Desa Sungai Cuka mengenai tapal batas tersebut. Keduanya mengambil acuan aliran Sungai Cuka yang dilintasi jalan provinsi sebagai acuan batas, kemudian ditarik lurus menuju jalan hutan tanaman industri (HTI). Pada saat Kabupaten Tanah Bumbu terbentuk tahun 2004, pada saat itu ZA sebagai bupati, tidak ada muncul permasalahan mengenai tapal batas ini. Pada saat itu ZA masih mengikuti tapal batas yang sudah disepakati terdahulu. Timbulnya pergeseran tapal batas ini pada masa pemerintahan MHM, (Wawancara, 2022). Ketika MRF, sebagai Kepala Desa Sungai Cuka saat ini mengkonfirmasi kepada MHM sebagai Bupati Tanah Bumbu mengenai kasus tapal batas, MHM mengatakan, bahwa pemerintahan desa harus mengikuti hasil dari apa yang diputuskan oleh pemerintah kabupaten saja. Masyarakat Desa Sungai Cuka sangat menyayangkan atas kasus perpindahan tapal batas ini. Masyarakat Desa Sungai Cuka mengalami kehilangan kontribusi perusahaan kepada desa mereka. Isu tapal batas sebenarnya adalah permainan para aktor untuk kepentingan kepentingan bisnis dan politik, atau adanya transaksional antara pemerintah Tanah Laut dengan pemerintah Tanah Bumbu. Pada wilayah tapal batas tersebut terdapat beberapa IUP. Dengan bergesernya batas dengan sedemikian

rupa, maka kedua belah pihak (Tanah Bumbu dan Tanah Laut), sama-sama mendapatkan keuntungan, karena ada dua IUP yang semula berada di Tanah Bumbu, kemudian sebagian masuk ke Tanah Laut.

Dari kronologis kasus tersebut tergambar adanya unsur kepentingan ekonomi dan politik antara kedua pejabat dari kedua kabupaten tersebut. Menurut HSN (53 tahun) dosen Universitas Lambung Mangkurat (Unlam), Banjarmasin menyatakan bahwa terjadinya perebutan perbatasan antara Tanah Bumbu dan Tanah Laut dikarenakan besarnya kandungan batu bara di wilayah perbatasan tersebut. Namun setelah salah satu oknum kepala daerah dan pengusaha diproses oleh pihak Mabes Polri atas dugaan penyusupan, namun kasusnya berakhir pada SP3", (Wawancara, 2022). Fenomena keterlibatan beberapa anggota legislatif dalam jaringan bisnis tambang, sebagai realitas yang sulit dibantah. Beberapa fakta empiris yang bisa menjelaskan hal tersebut. Dalam kasus konflik antara warga dengan perusahaan tambang PT. Tunas Inti Abadi (TIA) di Kecamatan Angsana terkait masalah pembebasan lahan warga yang belum mendapatkan ganti rugi. Sejumlah oknum anggota legislatif periode 2009-2014, terindikasi menerima uang suap atau gratifikasi dari perusahaan tambang. Lahan warga tersebut berada dalam konsensi IUP PT. TIA. Demonstrasi warga terhadap PT. TIA, kemudian mendapat respon dari sejumlah anggota legislatif untuk memediasi antara PT. TIA dengan pihak warga. Setelah sejumlah anggota legislatif memediasi kasus tersebut, tidak lama kemudian, PT. TIA beroperasi lagi dalam kegiatan penambangan. Artinya, dalam kasus ini telah terjadi persekongkolan dengan pihak perusahaan yang merugikan warga (Wawancara, 2022). Sebagai orang yang mendapatkan kuasa dari warga, AA selanjutnya mengkonfirmasi kepada pihak PT. TIA. Dari konfirmasi tersebut, pihak PT. TIA menyatakan sudah memberikan sejumlah uang kepada sejumlah oknum anggota legislatif. Sejumlah oknum anggota legislatif Tanah Bumbu menerima suap atau gratifikasi dari pihak PT. TIA sebesar 50 juta rupiah perbulan. Terkait hal tersebut, menurut NS (55 tahun) tokoh masyarakat di Satui mengatakan bahwa perusahaan tambang yang memiliki hubungan patronase politik dengan oknum anggota legislatif, cenderung tidak bisa menyuarakan kepentingan warga yang diwakilinya. Karena warga cenderung bertentangan dengan pihak perusahaan yang memiliki deal-deal dengan anggota legislatif yang terkait dalam jaringan bisnis tambang (Wawancara, 2022). Pada beberapa kasus yang sama, ketika warga mengadukan ke beberapa instansi terkait, terutama kepada instansi penegak hukum cenderung tidak mendapatkan respon. Seperti diungkapkan oleh ROS (35 tahun), warga Kecamatan Satui, sebagai korban perusahaan tambang. ROS mengatakan bahwa sekitar sebelas kepala keluarga (KK) belum mendapatkan ganti rugi oleh perusahaan tambang. ROS dan 11 KK telah mengadukan kasus ini ke lembaga legislatif, baik secara formal maupun informal, akan tetapi tidak mendapatkan respon. Para anggota legislatif sekedar memberikan janji-janji untuk memperjuangkan lewat jalur politik, karena sebagian anggota legislatif, khususnya yang duduk di Komisi III DPRD Tanah Bumbu, adalah orang-

orang yang berlatar belakang pengusaha tambang dan menjadi patronase atau kroni politik penguasa Tanah Bumbu (Wawancara, 2022).

Ibu ROS (33 Tahun), sebagai warga Desa Sinar Bulan, Satui, tinggal tidak jauh dari areal tambang PT. MJAB dan dikerjakan oleh PT. BBA, merasa terganggu dengan aktivitas pertambangan. Sebagian warga yang tinggal di sekitar areal pertambangan, hanya beberapa warga yang mendapatkan ganti rugi lahan, sementara masih ada 11 warga (KK) yang belum dibayar oleh pihak perusahaan. Jarak antara aktivitas tambang, PT. MJAB dengan pemukiman warga hanya berjarak sekitar 50 meter saja, sehingga menimbulkan kebisingan dan polusi di sekitar pemukiman warga. Selain itu, telah menyebabkan meninggalnya 3 orang anak yang terjatuh ke dalam lubang tambang tersebut. Warga Desa Sinar Bulan sudah pernah mengadukan persoalan ini ke DPRD Kabupaten Tanah Bumbu. Pihak perusahaan meminta warga melengkapi data-data yang dibutuhkan oleh perusahaan seperti ukuran tanah dan legalitasnya. Bila sudah lengkap akan diadakan pertemuan berikutnya untuk langkah penyelesaian. Namun, setelah warga melengkapi persyaratan tersebut dan mengundang pihak perusahaan, ternyata pihak perusahaan tidak merespon. Belum adanya penyelesaian maka warga menemui MHM, Bupati Tanah Bumbu. Pengaduan warga ditanggapi MHM dan berjanji akan menutup aktivitas tambang jika tidak menyelesaikan sengketa lahan dengan warga. Pihak perusahaan PT. MJAB tidak aktif pada tahun 2013, akan tetapi warga belum mendapatkan penyelesaian pembebasan lahan. Wakil Ketua DPRD Tanah Bumbu HSND (50 tahun) periode 2014-2019 mengatakan bahwa tidak menutup kemungkinan bila ada beberapa oknum anggota legislatif pada periode ini yang terlibat dalam jaringan tambang karena mereka berasal sebagai pengusaha atau memiliki jaringan dengan pihak perusahaan tambang. Namun demikian, jangan sampai lembaga legislatif ini tersandera oleh kepentingan tambang. Tambang adalah arena bisnis dari beberapa aktor yang berkepentingan secara ekonomi dan politik. Oleh karena itu, tidak menutup kemungkinan bila terjadi persekongkolan kepentingan dan praktik mafia pertambangan (Wawancara, 2022).

Seperti pada era kekuasaan Orde Baru, keterlibatan aparat keamanan tidak terpisahkan dalam jaringan bisnis dan politik. Aparat keamanan selalu tampil sebagai pengaman kepentingan dari para kelompok pengusaha, baik sebagai dalam kapasitas sebagai pengaman maupun terlibat langsung dalam jaringan bisnis dengan berkolaborasi dengan aktor lainnya. Hal yang sama juga terjadi di era pasca Orde Baru mengenai keterlibatan aparat keamanan, baik terlibat sebagai operator maupun sebagai pelindungan, khususnya dalam industri pertambangan. Kekuatan terstruktur dengan menggunakan institusi atau secara personal telah menjadi rahasia umum dalam aktivitas pertambangan di Kalsel. Keterlibatan yang terstruktur dan *under cover* tersebut, secara langsung memang agak sulit untuk mendapatkan penjelasan dari pihak aparat keamanan. Terkait dengan penelitian ini dalam upaya mengungkap keterlibatan pihak aparat keamanan dalam bisnis tambang, setidaknya seperti diungkapkan PS (55 Tahun), Profesor dalam Ilmu Politik dan Pemerintahan

Universitas Gajah Mada Yogyakarta mengatakan bahwa sebagai seorang peneliti dalam upaya mengungkap keterlibatan aparat keamanan dalam jaringan bisnis pertambangan tentu saja kemungkinan akan mengalami kesulitan untuk mendapatkan informasi langsung dari mereka. Karena sifatnya terstruktur maka salah satu cara adalah berusaha menangkap informasi yang berserakan dari berbagai pihak yang memiliki sejumlah informasi. Atau menangkap cerita-cerita warga dan fenomena yang berkembang di daerah atau di lokasi aktivitas pertambangan (Diskusi lepas dengan Prof. PW, April 2022 di Yogyakarta). Tidak mudah mendapatkan informasi langsung dari pihak oknum aparat keamanan. Selain itu, dapat diamati di lapangan adanya pembiaran terhadap aktivitas penambangan liar dan masih adanya aktivitas angkutan batu bara melintasi jalan publik di kawasan tertentu, terutama pada malam hari. Hal ini cukup menjelaskan keterlibatan oknum aparat keamanan dalam aktivitas tambang.

Dunia tambang adalah aktivitas ekonomi yang setiap saat berada dalam situasi *insecurity* dan konflik. Situasi ini bisa terjadi bila perusahaan tambang tidak memiliki interaksi yang baik dengan warga lokal. Resistensi dari warga suatu saat akan muncul bila warga lokal merasa tertindas dan dimarginalisasikan dari kehidupan budaya dan sosialnya. Lahan pertanian dirampas atau tidak dibayar ganti rugi oleh pihak perusahaan. Keterlibatan aparat keamanan dalam bisnis tambang dengan modus yang beragam. Pertama, oknum aparat keamanan memiliki kuasa pertambangan yang dioperasikan oleh orang-orang yang ada di daerah yang memiliki hubungan patronase. Oknum aparat keamanan, ada yang masih aktif atau sudah tidak aktif sebagai aparat negara. Kedua, menjadi *backing* perusahaan dan mendapatkan *fee* sesuai level atau struktur. Beberapa data informasi dari media massa yang mengulas mengenai jaringan terstruktur antara aparat keamanan dan bisnis tambang batu bara di Kalsel, misalnya BHD yang memiliki kedekatan dengan pengusaha sukses bernama HI. Banyak informasi yang membuktikan adanya hubungan antara BHD dan HI. Salah satunya adalah laporan mengenai konflik antara HI dan pengusaha tambang bernama HJ (50 tahun). Menurut AY (50 tahun), pengamat dan konsultan pertambangan mengatakan bahwa keterlibatan oknum aparat dalam jaringan bisnis tambang bukan rahasia lagi. Jaringan itu sistemik, terstruktur, dan *undercover*. Tambang adalah arena persekongkolan para aktor: pengusaha tambang, penguasa daerah, elite politik (anggota legislatif), elite partrai politik, aparat keamanan, preman tambang, dan kelompok kepentingan lainnya (LSM, Media Massa). Ini jaringan terstruktur yang sulit dibongkar tapi nyata di lapangan (Wawancara, 2022). Keterlibatan aparat keamanan dalam jaringan bisnis bukan hal baru di negeri ini. Pada era Orde Baru berkuasa, keterlibatan aparat keamanan dalam mengamankan bisnis keluarga Suharto sangat jelas. Pada saat ini hal sama juga terjadi di beberapa perusahaan tambang di Kalsel. Oleh karena itu, salah satu aktor dalam jaringan bisnis tambang adalah aparat keamanan yang berkolaborasi dengan pihak perusahaan. Kekuatan kapitalis mampu

mendikte institusi negara sehingga takluk pada kekuatan kapitalis. Institusi negara menjadi instrumen kepentingan kapitalis.

Berdasarkan Teori Oligarki Winters dan Robison-Hadiz, disintegrasi pemerintahan otoriter dan pengenalan institusi demokrasi dan pasar tidak dengan sendirinya memunculkan transformasi liberal yang lebih luas dari masyarakat dan politik. Kekuatan dan kepentingan telah membangun keunggulan mereka dalam rezim sebelumnya tidak serta merta menghilang bersama dengan institusi pemerintahan otoriter yang terpusat. Oligarki mengabaikan kemungkinan agensi dan menyajikan gambaran pesimistis tentang sebuah negara yang terjebak dalam struktural; bahwa mengingkari pentingnya institusi sebagai mekanisme perubahan; bahwa mengingkari pentingnya faktor-faktor non-materi dalam politik. Hal ini menyangkal terobosan nyata yang dibuat oleh gerakan politik dan sosial lokal dan akar rumput dalam masalah kebijakan, akuntabilitas, dan representasi. Oleh karena itu, itu merupakan klarifikasi singkat tentang sebuah tesis bahwa oligarki diperlakukan sebagai sistem hubungan kekuasaan yang memungkinkan konsentrasi kekayaan dan otoritas serta mempertahankan kolektivitasnya.

Penutup

Penelitian ini telah menemukan sejumlah fakta bahwa Kabupaten Tanah Bumbu sebagai salah satu kabupaten di Provinsi Kalimantan Selatan dikenal sebagai daerah memiliki potensi tambang batu bara. Eksploitasi sumber daya tambang batu bara yang telah berlangsung puluhan tahun yang dilakukan oleh sejumlah perusahaan tambang batu bara bukan saja sebatas aktivitas ekonomi-bisnis saja, akan tetapi telah merambah kepada wilayah politik kekuasaan. Sumber daya tambang batu bara yang kaya itu telah menjadi instrumen persekongkolan para aktor politik dan aktor bisnis (pengusaha tambang) untuk membangun jaringan patronase politik dan bisnis.

Jaringan patronase politik dan bisnis semakin terstruktur di era demokratisasi saat ini. Pemilihan kepala daerah (Pilkada) langsung sebagai praaktek demokrasi yang telah berjalan selama pasca reformasi yang melahirkan transisi demokrasi telah memberikan ruang dan kesempatan bagi para aktor bisnis. Praktek demokrasi berbiaya tinggi, keterlibatan pengusaha menguasai panggung politik menjadi fenomena perpolitikan nasional saat ini. Melalui kuasa modal, pengusaha telah menyandera panggung politik atau menjadi penumpang gelap mereposisi diri masuk ke dalam jaringan kekuasaan yang ada. Pengaruh oligarki lokal di Tanah Bumbu tidak saja mengakumulasi sumber daya ekonomi lokal, tetapi juga mengakumulasi sumber daya politik. Relasi politik dan bisnis sebagai satu bangun yang terstruktur dan membentuk jaringan patronase politik dan ekonomi. Pola jaringan ini terbentuk melalui persekongkolan. Penguasa daerah memiliki sumber legitimasi kekuasaan berupa kebijakan dan regulasi. Sementara kelompok pengusaha memiliki sumber daya bisnis yang memerlukan lisensi dan dukungan kebijakan dan proteksi kebijakan

dari penguasa daerah. Relasi penguasa dan pengusaha yang saling mempertemukan kepentingan saling mempertukarkan sumber daya yang dimiliki masing-masing aktor, aktor politik dan bisnis. Perjumpaan kepentingan para aktor itu pada akhirnya melahirkan kroni politik dan kroni bisnis sebagai patron-klien. Hal tersebut terjadi karena tidak terimplementasinya prinsip-prinsip *good governance* atau *good corporate governance* seperti transparansi, akuntabilitas, penegakan hukum, dan partisipasi publik. Selama ini yang terjadi ada semacam proses pembiayaan oleh negara (pemerintah atau instansi terkait) sehingga aktivitas tambang menjadi arena persekongkolan politik dan bisnis. Tidak terimplementasinya prinsip-prinsip tersebut industri tambang semakin terjebak ke dalam *bad governance practice* yang memberikan kesempatan bagi para pengusaha tambang oligarki untuk mengakumulasi sumber daya tambang secara oligarkis-predatoris. Oleh karena perlu memperbaiki kebijakan dan regulasi yang ada untuk menegakan prinsip-prinsip *good corporate governance*.

Ucapan Terima Kasih

Terima kasih kepada para reviewer Jurnal Politika yang telah memberikan masukan dan koreksinya yang berharga.

Pendanaan

Terima kasih kepada LP2M UNiSKA yang telah memberikan pendanaan pada penelitian ini.

Daftar Pustaka

- Afala, L.M. (2017). Pasang Surut Reformasi Birokrasi dalam Transisi Demokrasi Indonesia. *Jurnal Transformative*, 3(1), 15–39.
- Agustino, L., & Yusoff, M. A. (2010). Politik Lokal di Indonesia: dari Otokratik ke Reformasi Politik. *Jurnal Ilmu Politik*, 21, 5–30. <https://www.researchgate.net/publication/311432680>
- Alatas, S.H. (1975). *Sosiologi Korupsi Sebuah Penjelajahan dengan Data Kontemporer* (1st ed.). Jakarta: LP3ES.
- Ananta, D.D. (2014). Oligarki: Tatanan Ekonomi Politik Indonesia Kontemporer. *Indoprogress.com*. <https://indoprogress.com/2014/11/oligarki-tatanan-ekonomi-politik-indonesia-kontemporer/>
- As'ad, M.U. (2020). Ketika Sumber Daya Alam Menjadi Arena Korupsi dan Persekongkolan Politik Para Aktor di Era Demokratisasi (Memahami Dinamika Politik Lokal di Kalimantan Selatan). In *Korupsi, Pemilu dan Sumber Daya Alam* (pp. 193–226).
- Aspinall, E., & Sukmajati, M. (2014). *Electoral Dynamics in Indonesia Money Politics, Patronage and Clientelism at the Grassroots*. Singapore: Nus Press.
- Fitriani, D.F. (2021). Praktek Rent Seeking (Pemburu Rente): Praktek Politik Dan Bisnis Di Kalangan Birokrasi (Rent Seeking Practice: Political and Business Practices in

- The Bureaucracy). *The World Financial Administration Journal*.
<http://ejournal.unsub.ac.id/index.php/keuangan/article/view/1196>
- Kadir, A. (2020). *Fenomena Kebijakan Publik dalam Perspektif Administrasi Publik di Indonesia*. Jakarta: Dharma Persada Dharmasraya.
- Kompas.com. (2017). Gubernur Sulawesi Tenggara Didakwa Rugikan Negara Rp 4,3 Triliun. Diakses dari:
<https://nasional.kompas.com/read/2017/11/20/16521491/gubernur-sulawesi-tenggara-didakwa-rugikan-negara-rp-43-triliun>
- Kusumastuti, A., & Khoiron, A. M. (2019). *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Lembaga Pendidikan Sukarno Pressindo.
- Moleong, L. J. (2014). *Metode Penelitian Kualitatif* (edisi 1 re). Remaja Rosdakarya.
- Moselle, B., & Polak, B. (2001). *A Model of a Predatory State. Economics, & Organization*, 17(1), 1–33.
- Muliyawan. (2021). Korupsi dalam Pusaran Politik dan Budaya. [Www.Pn-Palopo.Go.Id](http://www.pn-palopo.go.id).
<https://www.pn-palopo.go.id/index.php/berita/artikel/220-korupsi-dalam-pusaran-politik-dan-budaya>
- Puranen, B., & Widenfalk, O. (2007). *The Rentier State: Does Rentierism Hinder Democracy? The Rentier Mentality Hypothesis Tested in Seven Middle Eastern Countries*.
- Puskapol.ui.ac.id. (2018). Mahalnya Ongkos Politik: Catatan Diskursus Pilkada Langsung. www.puskapol.ui.ac.id.
<https://www.puskapol.ui.ac.id/opini/mahalnya-ongkos-politik-catatan-diskursus-pilkada-langsung.html>
- Raco, J. R. (2018). *Metode penelitian kualitatif: jenis, karakteristik dan keunggulannya*. Jakarta: Grasindo.
- Samsuddin, H., Indra Gunawan, C., & Sasmito, C. (2019). Membongkar Relasi Kekuasaan Oligarki di Kota Batu: Studi Kasus Penyalahgunaan Kekuasaan dalam Pemberian Keringanan Pajak dan Korupsi Kebijakan PT BWR. *Jurnal Ilmu Administrasi*, XVI (2), 210–227.
- Simanjuntak, K. M. (2015). Implementasi Kebijakan Desentralisasi Pemerintahan di Indonesia. *Jurnal Bina Praja*, 7(2), 111–130.
- Suryani, D., Fildzah Izzati, F., Syafi, I., Yuhsina Adaba, P., & Satriani, S. (2021). Kemunduran Demokrasi Tata Kelola SDA: Penguatan Oligarki dan Pelemahan Partisipasi Civil Society. *Jurnal Penelitian Politik*, 18(2), 173–189.
<https://ejournal.politik.lipi.go.id/>
- Susanto, N. N. (2019). Eksploitasi Hutan Dan Tambang Pada Masa Kolonial Di Kalimantan Bagian Utara (*Forest and Mining Exploitation During the Colonial Period in The Northern Part Of Kalimantan*). *Kindai Etam: Jurnal Penelitian Arkeologi*, 4(1).
<https://doi.org/10.24832/KE.V4I1.35>

Wibisono, S.G. (2018). Tambang Batu Bara Kaltim disebut jadi Sarang Korupsi. Beritagar.Id. <https://beritagar.id/artikel-amp/berita/tambang-batu-bara-kaltim-disebut-jadi-sarang-korupsi>

Daftar Informan

AMD YN (50 tahun), pengamat dan konsultan pertambangan di Kalsel, wawancara April 2022 di Satui, Tanah Bumbu.

AY (50 tahun), pengamat dan konsultan pertambangan, wawancara Mei 2022 di Satui, Tanah Bumbu.

FM (45 tahun), anggota DPRD Tanah Bumbu, wawancara Mei 2022 di Pagatan, Tanah Bumbu.

FS (50 tahun), mantan anggota DPRD Tanah Bumbu periode 2009-2014, wawancara, Mei 2022 di Satui, Tanah Bumbu.

HSN (53 tahun) dosen Universitas Lambung Mangkurat (Unlam), Banjarmasin, wawancara Mei 2022 di Banjarmasin.

HSND (50 tahun), wawancara April 2022 di Tanah Bumbu.

IH (57 tahun), mantan anggota DPRD Tanah Bumbu periode 2009-2014, wawancara Mei 2022 di Pagatan, Tanah Bumbu.

ISP (48 tahun), reporter Metro TV Tanah Bumbu-Kotabaru, wawancara Mei 2022 di Simpang Batulicin, Tanah Bumbu.

MRF (45 tahun), Kepala Desa Sungai Cuka Kecamatan Satui, wawancara Mei 2022 di Satui, Tanah Bumbu.

PS (55 Tahun), Profesor dalam Ilmu Politik dan Pemerintahan Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, wawancara April 2022 di Yogyakarta.

ROS (35 tahun), warga Kecamatan Satui, sebagai korban perusahaan tambang, wawancara April 2022 di Satui, Tanah Bumbu.

Tentang Penulis

M. Uhaib As'ad adalah dosen Program Studi Administrasi Publik, Universitas Islam Kalimantan. Penulis memiliki area riset seputar kebijakan publik dan sosial politik.

Barsihanor adalah dosen Program Studi Administrasi Publik, Universitas Islam Kalimantan. Penulis memiliki area riset seputar kebijakan publik dan sosial politik.

Sobirin adalah dosen Fakultas Hukum Universitas Ahmad Dahlan

Putri Hergianasari adalah dosen Departemen Sosial Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Komunikasi, Universitas Kristen Satya Wacana. Penulis memiliki area riset seputar tema politik dan geopolitik.